

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah Kabupaten Pasaman

¹Diva Pujana, ²Citra Ramayani, ³Jolianis

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Sumatera Barat, Jl. Gn. Pangilun, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: divapujanadiva@gmail.com

Received: Jene 2026; Revised: July 2026; Published: August 2026

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Daerah Kabupaten Pasaman selama 2004–2024. Penelitian menggunakan 21 observasi tahunan dari Badan Pusat Statistik dan publikasi pemerintah daerah. Analisis EViews meliputi transformasi logaritma natural, uji Augmented Dickey–Fuller, diagnostik residual, Ramsey RESET, regresi linear berganda, dan pengujian signifikansi 5%. Estimasi utama menunjukkan PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan, dengan koefisien 0,191187; 0,564592; 0,164907; dan 0,235184. Model empat prediktor signifikan secara simultan ($F = 539,0066$; $p < 0,001$) dengan R-squared 0,992634. Uji Likelihood Ratio tambahan menunjukkan PDRB belum signifikan pada taraf 5% ($p = 0,0577$). Temuan menegaskan bahwa kapasitas belanja Pasaman berkaitan kuat dengan penerimaan daerah dan transfer antarpemerintah, terutama DAU. Penguatan kemandirian fiskal perlu disertai pengelolaan transfer yang produktif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Hasil ini memberikan bukti empiris spesifik bagi pengelolaan fiskal Kabupaten Pasaman.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; transfer antarpemerintah; PDRB; Belanja Daerah; desentralisasi fiskal

The Effect of Local Own-Source Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, and Gross Regional Domestic Product on Regional Expenditure in Pasaman Regency

Abstract

This study examines the effects of Local Own-Source Revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), the Revenue Sharing Fund (DBH), and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on regional expenditure in Pasaman Regency during 2004–2024. The study uses 21 annual observations from Statistics Indonesia and local government publications. EViews analysis includes natural-log transformation, the Augmented Dickey–Fuller test, residual diagnostics, Ramsey RESET, multiple linear regression, and 5% significance testing. The main regression shows positive and significant coefficients for PAD, DAU, DAK, and DBH of 0.191187, 0.564592, 0.164907, and 0.235184, respectively. The four-predictor model is jointly significant ($F = 539.0066$; $p < 0.001$) with an R-squared of 0.992634. An additional Likelihood Ratio test indicates that GRDP is not significant at the 5% level ($p = 0.0577$). The findings show that Pasaman Regency's expenditure capacity is strongly associated with own-source revenue and intergovernmental transfers, particularly the General Allocation Fund. Fiscal autonomy should therefore be strengthened alongside productive, accountable, and outcome-oriented transfer management.

Keywords: local own-source revenue; intergovernmental transfers; gross regional domestic product; regional expenditure; fiscal decentralization

How to Cite: Pujana, D., Ramayani, C., & Jolianis, J. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah Kabupaten Pasaman. *Journal of Authentic Research*, 5(3), 6460–6476. <https://journal-center.litpam.com/index.php/jar/article/view/6368>



<https://journal-center.litpam.com/index.php/jar/article/view/6368>

Copyright© 2026, Pujana et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA

License.



PENDAHULUAN

Belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah kabupaten untuk mengubah kapasitas fiskal menjadi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi lokal. Dalam kerangka desentralisasi, kualitas belanja tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan daerah membangun basis penerimaan sendiri dan memanfaatkan transfer antarpemerintah secara efektif. Literatur internasional menunjukkan bahwa desentralisasi pada sisi penerimaan dapat memengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah lokal, karena kewenangan fiskal mengubah insentif dalam menentukan prioritas belanja (Park, 2022). Pada negara berkembang dengan kapasitas penerimaan lokal yang terbatas, transfer fiskal juga dapat memperbesar belanja pemerintah daerah dan menghasilkan efek pengganda lintas wilayah (Vincent & Osei Kwadwo, 2022). Di Indonesia, hubungan pusat-daerah memasuki fase baru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menata kembali instrumen pendapatan, transfer, dan disiplin belanja; perubahan tersebut menegaskan bahwa kapasitas fiskal daerah perlu dinilai bersama kualitas alokasi pengeluarannya (Lewis, 2023). Dalam konteks ini, Kabupaten Pasaman menghadapi kebutuhan pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan dengan struktur fiskal yang menggabungkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer. Karena itu, variasi PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta kondisi ekonomi daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi relevan untuk menjelaskan perubahan Belanja Daerah.

Permasalahan empirisnya adalah bahwa peningkatan belanja daerah tidak selalu mencerminkan peningkatan kemandirian fiskal. Berbagai pemerintah daerah di Indonesia masih menunjukkan respons belanja yang kuat terhadap transfer pusat. Studi pada kabupaten/kota Indonesia menemukan bahwa ketergantungan terhadap transfer dapat berbeda menurut kondisi ekonomi daerah dan jenis pengeluaran (Septianingrum et al., 2025), sedangkan kajian pada masa pandemi menunjukkan bahwa perubahan transfer antarpemerintah tetap berkaitan erat dengan pola belanja daerah (Nurosidah et al., 2023). Setelah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke pemerintah daerah, bukti lain juga menunjukkan bahwa penguatan basis pajak lokal belum otomatis menghilangkan respons belanja terhadap transfer (Afrizal & Khoirunurrofik, 2022). Temuan dari konteks internasional memperlihatkan pola yang serupa tetapi tidak identik. Di Benin, hibah antarpemerintah meningkatkan belanja lokal dan menimbulkan spillover ke wilayah tetangga (Vincent & Osei Kwadwo, 2022), sedangkan di Korea Selatan, desentralisasi penerimaan memengaruhi komposisi belanja lokal (Park, 2022). Pada tingkat nasional dan daerah di Indonesia, hasil mengenai PAD, DAU, DAK, DBH, dan pertumbuhan ekonomi juga belum sepenuhnya konsisten. Septriani et al. (2023), misalnya, menemukan DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja, sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah yang berbeda. Ketidakteraturan hasil ini menegaskan urgensi pengujian yang mempertimbangkan karakteristik fiskal, struktur ekonomi, periode, dan satuan wilayah secara spesifik.

Kesenjangan penelitian terletak pada masih terbatasnya bukti jangka panjang yang secara khusus menguji struktur penerimaan Kabupaten Pasaman dengan memisahkan komponen transfer utama dan memasukkan PDRB dalam satu kerangka

analisis. Sebagian studi terdahulu menggunakan panel banyak kabupaten/kota, periode yang lebih pendek, atau memusatkan perhatian pada belanja modal, sehingga hasilnya tidak langsung menggambarkan dinamika total Belanja Daerah di satu kabupaten. Penelitian pada Sumatera Barat menunjukkan bahwa PAD dan berbagai transfer fiskal relevan bagi pola belanja daerah, tetapi karakteristik antarwilayah tetap berpotensi menghasilkan respons yang berbeda (Akbar & Huda, 2024). Penelitian lain juga memperlihatkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH dapat memiliki pengaruh yang tidak seragam menurut wilayah dan periode pengamatan (Ferawaty et al., 2022; Faisal et al., 2024; Putra et al., 2025). Kebaruan kajian ini adalah penggunaan seri tahunan 2004–2024 untuk Kabupaten Pasaman, yang mencakup fase panjang implementasi desentralisasi fiskal, periode pandemi, dan awal penerapan kerangka hubungan keuangan pusat-daerah yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, penelitian memisahkan DAU, DAK, dan DBH agar sensitivitas Belanja Daerah terhadap masing-masing jenis transfer dapat dibandingkan dengan PAD. PDRB digunakan sebagai indikator kondisi ekonomi daerah untuk menguji apakah perluasan aktivitas ekonomi berhubungan langsung dengan kapasitas belanja, atau apakah kanal fiskal melalui penerimaan dan transfer lebih dominan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB terhadap Belanja Daerah Kabupaten Pasaman selama 2004–2024, baik secara individual maupun simultan sesuai keluaran estimasi yang tersedia. PAD diposisikan sebagai proksi kapasitas pendapatan yang bersumber dari kewenangan daerah; DAU sebagai transfer umum untuk pemerataan kemampuan keuangan; DAK sebagai transfer yang diarahkan pada kegiatan tertentu; DBH sebagai transfer yang berasal dari pembagian penerimaan tertentu antara pemerintah pusat dan daerah; dan PDRB sebagai ukuran nilai tambah ekonomi wilayah. Berdasarkan teori desentralisasi fiskal dan temuan empiris sebelumnya, PAD, DAU, DAK, dan DBH diharapkan berasosiasi positif dengan Belanja Daerah karena meningkatkan sumber daya fiskal yang dapat dibelanjakan. PDRB juga secara konseptual dapat berkaitan positif dengan belanja karena aktivitas ekonomi yang lebih besar dapat memperluas basis penerimaan dan kebutuhan layanan, walaupun kekuatan hubungan tersebut bergantung pada struktur fiskal dan kebijakan anggaran. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada total Belanja Daerah Kabupaten Pasaman dan lima variabel penjelas tersebut dengan data tahunan sekunder. Analisis diarahkan untuk menghasilkan bukti empiris yang relevan bagi penguatan kemandirian fiskal, pengelolaan transfer, dan perencanaan belanja daerah yang lebih akuntabel.

METODE

Desain Penelitian dan Cakupan Pengamatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori berbasis data runtut waktu tahunan. Unit analisis adalah Kabupaten Pasaman, sedangkan unit observasi adalah tahun anggaran selama periode 2004–2024, sehingga tersedia 21 observasi. Desain ini dipilih untuk menguji keterkaitan perubahan sumber penerimaan daerah dan kondisi ekonomi dengan perubahan Belanja Daerah dalam satu yurisdiksi yang sama sepanjang waktu. Variabel dependen adalah total Belanja Daerah, sedangkan variabel independen meliputi PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB. Karena seluruh data berasal dari catatan administratif dan statistik resmi, penelitian

tidak melibatkan perlakuan eksperimental, randomisasi, maupun responden manusia. Oleh sebab itu, istilah “pengaruh” dalam penelitian dipahami sebagai hubungan statistik dalam spesifikasi model, bukan bukti kausal eksperimental. Periode 2004–2024 dipilih karena mencakup rentang panjang pelaksanaan desentralisasi fiskal, perubahan kebijakan transfer, periode pandemi, serta awal implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Analisis dilakukan dengan EViews. Sesuai spesifikasi data pada naskah sumber, variabel keuangan dan ekonomi ditransformasikan ke bentuk logaritma natural sebelum estimasi sehingga skala antarvariabel menjadi lebih sebanding dan koefisien dapat dibaca sebagai respons proporsional ketika model memenuhi asumsi yang diperlukan. Pendekatan satu-wilayah dipertahankan agar dinamika fiskal Pasaman tidak tertutupi heterogenitas antarkabupaten, tetapi konsekuensinya ukuran sampel relatif kecil dan setiap hasil perlu dibaca sebagai bukti spesifik wilayah.

Sumber Data, Unit Analisis, dan Operasionalisasi Variabel

Data penelitian merupakan data sekunder tahunan yang dihimpun melalui studi dokumentasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi resmi Pemerintah Kabupaten Pasaman yang memuat informasi keuangan daerah serta indikator ekonomi. Pemilihan sampel menggunakan pendekatan sensus terhadap seluruh tahun yang tersedia dalam rentang penelitian, yaitu 2004 sampai 2024; dengan demikian, tidak dilakukan teknik sampling probabilitas. Dokumen sumber digunakan untuk membentuk seri Belanja Daerah, PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB pada tahun yang sama. Belanja Daerah didefinisikan sebagai total pengeluaran pemerintah daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. PAD mencerminkan penerimaan yang bersumber dari kewenangan daerah, sedangkan DAU, DAK, dan DBH merepresentasikan tiga mekanisme transfer yang memiliki tujuan dan tingkat fleksibilitas penggunaan yang berbeda. PDRB digunakan untuk merepresentasikan skala aktivitas ekonomi Kabupaten Pasaman. Satuan moneter mengikuti publikasi resmi sumber data dan kemudian ditempatkan pada skala yang konsisten sebelum transformasi logaritma. Operasionalisasi variabel disajikan pada Table 1. Penggunaan sumber resmi dimaksudkan untuk menjaga keterlacakan data, sedangkan seluruh interpretasi empiris dibatasi pada periode dan wilayah penelitian sehingga tidak langsung digeneralisasi ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Tidak ada observasi lintas kabupaten yang digabungkan ke dalam model. Strategi tersebut menjaga konsistensi unit institusional, tetapi membuat kualitas kesimpulan sangat bergantung pada kontinuitas dan keterbandingan data tahunan yang diterbitkan.

Table 1. Operasionalisasi variabel penelitian

Variabel	Definisi operasional	Pengukuran/proksi	Satuan
Belanja Daerah (Y)	Total pengeluaran pemerintah daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.	Total Belanja Daerah	Rupiah (sesuai publikasi sumber)
PAD (X1)	Pendapatan yang bersumber dari kewenangan dan potensi penerimaan daerah.	Total PAD	Rupiah (sesuai publikasi sumber)
DAU (X2)	Transfer umum untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.	Total DAU	Rupiah (sesuai publikasi sumber)

Variabel	Definisi operasional	Pengukuran/proksi	Satuan
DAK (X3)	Transfer untuk mendukung kegiatan tertentu sesuai prioritas dan ketentuan.	Total DAK	Rupiah (sesuai publikasi sumber)
DBH (X4)	Transfer berdasarkan pembagian penerimaan tertentu antara pemerintah pusat dan daerah.	Total DBH	Rupiah (sesuai publikasi sumber)
PDRB (X5)	Nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam perekonomian Kabupaten Pasaman.	PDRB Kabupaten Pasaman	Rupiah (sesuai seri BPS)

Sumber: Disusun dari definisi variabel pada naskah dan sumber data resmi.

Instrumen Dokumentasi dan Prosedur Pengolahan Data

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini bukan kuesioner atau tes, melainkan lembar dokumentasi yang digunakan untuk mencatat nilai setiap variabel menurut tahun, sumber, dan satuan publikasi. Karena instrumen bersifat dokumenter, validitas tidak dievaluasi melalui uji konstruk atau reliabilitas internal seperti pada penelitian survei. Keandalan pengumpulan data ditopang oleh penggunaan sumber statistik dan administratif resmi serta pencocokan periode pengamatan antarseri sebelum pengolahan. Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yang berurutan. Pertama, seri tahunan Belanja Daerah, PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB dihimpun untuk 2004–2024. Kedua, nama variabel, satuan, dan tahun observasi diselaraskan sehingga setiap baris data merepresentasikan tahun yang sama. Ketiga, data dimasukkan ke EViews dan ditransformasikan ke logaritma natural sesuai spesifikasi analisis yang digunakan pada naskah sumber. Keempat, seri diperiksa melalui uji stasioneritas sebelum estimasi regresi. Kelima, model diestimasi dan residual dievaluasi melalui uji diagnostik. Prosedur dokumentasi ini penting karena perubahan definisi atau satuan pada seri fiskal dapat memengaruhi estimasi. Oleh karena itu, setiap pembaruan data sebelum submit akhir perlu mempertahankan seri dan definisi yang sama dengan sumber resmi agar hasil tetap dapat direplikasi. Pemeriksaan ulang angka terhadap dokumen asal juga diperlukan apabila terdapat revisi seri oleh instansi penerbit. Dengan cara ini, jejak data dari tabel publikasi hingga file analisis dapat dipertahankan dan kesalahan transkripsi dapat diminimalkan.

Teknik Analisis Data dan Pengujian Model

Analisis dimulai dengan uji stasioneritas Augmented Dickey–Fuller (ADF) untuk mengidentifikasi sifat runtut waktu setiap variabel dan mengurangi risiko regresi lancung. Selanjutnya, model dasar dirumuskan sebagai $\ln(BD)_t = \beta_0 + \beta_1 \ln(PAD)_t + \beta_2 \ln(DAU)_t + \beta_3 \ln(DAK)_t + \beta_4 \ln(DBH)_t + \beta_5 \ln(PDRB)_t + \epsilon_t$. Estimasi utama yang tersedia pada dokumen sumber menggunakan Ordinary Least Squares (OLS) dan memuat PAD, DAU, DAK, serta DBH. Kelayakan residual dievaluasi melalui uji Jarque–Bera untuk normalitas, uji Glejser untuk heteroskedastisitas, dan Breusch–Godfrey LM test untuk autokorelasi. Ramsey RESET digunakan untuk menilai kemungkinan kesalahan spesifikasi bentuk fungsi. Signifikansi parameter ditetapkan pada $\alpha = 0,05$, dengan uji t untuk koefisien individual pada output OLS, uji F untuk signifikansi simultan, dan koefisien determinasi untuk melihat daya jelas model. Pengujian Likelihood Ratio yang tersedia digunakan sebagai pemeriksaan tambahan, termasuk untuk PDRB. Praktik pengujian asumsi sebelum interpretasi

koefisien konsisten dengan prinsip ekonometrika dasar (Gujarati & Porter, 2009) dan penelitian pengukuran flypaper effect berbasis model regresi (Tanjung et al., 2021). Karena output ADF menunjukkan orde integrasi yang berbeda dan output OLS utama belum memuat koefisien PDRB, inferensi jangka panjang dan klaim untuk PDRB ditafsirkan secara hati-hati. Nilai R-squared yang tinggi tidak digunakan sebagai bukti bebas masalah multikolinearitas; diagnosis tersebut seharusnya didasarkan pada matriks korelasi atau Variance Inflation Factor. Karena output VIF tidak tersedia pada dokumen sumber, naskah ini tidak menyatakan bahwa asumsi multikolinearitas telah terpenuhi.

$$\ln(BD)t = \beta_0 + \beta_1 \ln(PAD)t + \beta_2 \ln(DAU)t + \beta_3 \ln(DAK)t + \beta_4 \ln(DBH)t + \beta_5 \ln(PDRB)t + \varepsilon_t$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Stasioneritas dan Kelayakan Model

Hasil uji ADF menunjukkan bahwa seri fiskal yang tersedia tidak memiliki orde integrasi yang seragam. Belanja Daerah dan DAU menjadi stasioner pada second difference dengan probabilitas masing-masing 0,0000, sedangkan PAD, DAK, dan DBH menjadi stasioner pada first difference dengan probabilitas 0,0059; 0,0050; dan 0,0049. Nilai statistik ADF pada tingkat stasioner yang dilaporkan lebih negatif daripada nilai kritis 5%, sehingga hipotesis akar unit ditolak pada transformasi tersebut. Temuan ini penting karena data fiskal tahunan cenderung mengalami tren seiring pertumbuhan nominal anggaran. Namun, output ADF yang tersedia belum memuat PDRB. Karena itu, sifat stasioneritas PDRB belum dapat dievaluasi dari dokumen analisis yang tersedia. Perbedaan orde integrasi juga berarti hasil OLS pada level logaritmik tidak boleh langsung dibaca sebagai hubungan jangka panjang tanpa pemeriksaan tambahan terhadap sifat kointegrasi atau spesifikasi runtut waktu yang sesuai. Dengan 21 observasi, kehati-hatian ini menjadi semakin penting karena satu atau dua periode ekstrem dapat memiliki pengaruh relatif besar. Table 2 merangkum hasil ADF yang dapat diverifikasi dari output sumber, tanpa menambahkan angka untuk PDRB yang memang belum tersedia.

Table 2. Hasil uji stasioneritas Augmented Dickey–Fuller

Variabel	ADF statistic	Prob.	Tingkat	Keputusan
Belanja Daerah	-7.606862	0.0000	Second difference	Stasioner
PAD	-4.088400	0.0059	First difference	Stasioner
DAU	-13.37886	0.0000	Second difference	Stasioner
DAK	-4.197884	0.0050	First difference	Stasioner
DBH	-4.176005	0.0049	First difference	Stasioner

Sumber: Output EViews, 2026. Output ADF untuk PDRB belum tersedia pada dokumen sumber.

Uji diagnostik residual memberikan hasil yang relatif mendukung kelayakan bentuk model empat prediktor yang tersedia. Uji Jarque–Bera menghasilkan probabilitas 0,361519, sehingga tidak terdapat dasar untuk menolak normalitas residual pada taraf 5%. Uji Glejser menghasilkan Prob. F sebesar 0,7999 dan Prob. Chi-Square sebesar 0,7457, yang tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas berdasarkan keluaran tersebut. Breusch–Godfrey LM test memberikan Prob. Chi-Square 0,5113, sehingga tidak ditemukan bukti autokorelasi residual pada taraf 5%. Ramsey RESET juga menghasilkan probabilitas F sebesar 0,2193, yang tidak

memberikan bukti kuat mengenai kesalahan spesifikasi bentuk fungsi. Meskipun demikian, empat diagnosis tersebut tidak menggantikan pemeriksaan multikolinearitas. R-squared yang tinggi bukan ukuran multikolinearitas, sehingga kesimpulan mengenai korelasi berlebihan antarvariabel hanya dapat dibuat setelah tersedia matriks korelasi atau Variance Inflation Factor. Praktik pengujian model secara berlapis sejalan dengan pendekatan ekonometrika yang menempatkan kualitas residual dan spesifikasi sebagai syarat interpretasi parameter (Gujarati & Porter, 2009). Dengan demikian, Table 3 diperlakukan sebagai bukti kelayakan parsial, bukan sebagai validasi menyeluruh seluruh asumsi model.

Table 3. Ringkasan uji diagnostik model

Uji	Statistik	Prob.	Interpretasi
Jarque-Bera normality	2.034879	0.361519	Tidak menolak normalitas residual
Glejser heteroskedasticity (Prob. F)	0.408492	0.7999	Tidak terindikasi heteroskedastisitas
Breusch-Godfrey LM (Obs*R-squared)	1.341709	0.5113	Tidak terindikasi autokorelasi
Ramsey RESET (Prob. F)	—	0.2193	Tidak terindikasi kesalahan spesifikasi

Sumber: Output EViews, 2026.

Estimasi Regresi dan Signifikansi Model

Estimasi OLS utama menghasilkan persamaan $\ln(\text{Belanja Daerah}) = 0,984228 + 0,191187\ln(\text{PAD}) + 0,564592\ln(\text{DAU}) + 0,164907\ln(\text{DAK}) + 0,235184\ln(\text{DBH}) + \varepsilon$. Seluruh koefisien penerimaan yang masuk dalam model bertanda positif dan signifikan pada taraf 5%. Nilai F-statistic sebesar 539,0066 dengan probabilitas di bawah 0,001 menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH secara bersama-sama berkaitan signifikan dengan Belanja Daerah. R-squared sebesar 0,992634 dan adjusted R-squared sebesar 0,990792 memperlihatkan daya jelas model yang sangat tinggi terhadap variasi sampel. Namun, angka tersebut perlu dibaca bersama karakteristik runtut waktu dan jumlah observasi yang kecil, sehingga tidak ditafsirkan sebagai bukti hubungan kausal yang sempurna. Table 4 menyajikan koefisien, standard error, t-statistic, dan probabilitas dalam format ringkas. PDRB tidak muncul pada output OLS utama yang tersedia; karena itu, naskah ini tidak mengarang koefisien PDRB dan hanya melaporkan pengujian Likelihood Ratio tambahan pada Table 5. Pemisahan ini menjaga konsistensi antara angka yang benar-benar tersedia dan interpretasi yang diberikan.

Table 4. Hasil estimasi OLS Belanja Daerah

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistic	Prob.
C	0.984228	0.624222	1.576727	0.1344
PAD	0.191187	0.059660	3.204608	0.0055
DAU	0.564592	0.159388	3.542254	0.0027
DAK	0.164907	0.041551	3.968758	0.0011
DBH	0.235184	0.083894	2.803358	0.0128

Sumber: Output EViews, 2026. $R^2 = 0.992634$; Adjusted $R^2 = 0.990792$; $F = 539.0066$; Prob(F) = 0.000000; Durbin-Watson = 2.091698.

Table 5. Uji signifikansi tambahan berdasarkan Likelihood Ratio

Variabel	Likelihood Ratio	Prob.	Keputusan
PAD	10.08145	0.0015	Signifikan
DAU	6.934705	0.0085	Signifikan
DAK	5.873100	0.0154	Signifikan
DBH	7.844604	0.0051	Signifikan
PDRB	3.603381	0.0577	Tidak signifikan pada 5%

Sumber: Output EViews, 2026.

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah

Koefisien PAD sebesar 0,191187 dengan t-statistic 3,204608 dan probabilitas 0,0055 menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara kapasitas pendapatan yang dikendalikan daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman. Dalam spesifikasi logaritmik yang tersedia, kenaikan PAD berkaitan dengan kenaikan belanja, ceteris paribus. Secara fiskal, hasil ini masuk akal karena PAD memberikan ruang yang relatif lebih dekat dengan keputusan pemerintah daerah dibandingkan transfer yang penggunaannya sebagian ditentukan oleh desain kebijakan pusat. Peningkatan penerimaan dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan sumber PAD sah lainnya dapat memperbesar kemampuan pemerintah daerah membiayai pelayanan serta program pembangunan. Meski demikian, besarnya koefisien PAD lebih rendah daripada koefisien DAU pada model yang sama. Pola tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan sumber penerimaan sendiri belum menjadi satu-satunya penggerak belanja Kabupaten Pasaman. Temuan ini tidak otomatis membuktikan ketergantungan fiskal, tetapi memperlihatkan bahwa ruang belanja masih dibentuk bersama oleh penerimaan lokal dan transfer. Karena penelitian menggunakan total Belanja Daerah, koefisien ini menggambarkan respons agregat dan tidak menunjukkan apakah tambahan PAD terutama dialokasikan untuk belanja operasi, modal, atau fungsi pelayanan tertentu. Dalam kerangka penganggaran tahunan, peningkatan PAD juga dapat memperkuat fleksibilitas pembiayaan karena pemerintah daerah memiliki keleluasaan lebih besar dalam menghubungkan sumber penerimaan sendiri dengan kebutuhan lokal yang tidak seluruhnya dapat dibiayai melalui transfer khusus.

Temuan PAD konsisten dengan sejumlah penelitian Indonesia yang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah memperbesar kapasitas pembiayaan pemerintah daerah. Dahliah (2022) menemukan keterkaitan PAD dengan belanja daerah, sedangkan Ferawaty et al. (2022) menunjukkan bahwa PAD bersama transfer fiskal merupakan determinan penting belanja kabupaten/kota. Pada konteks

Sumatera Barat, Akbar dan Huda (2024) juga menempatkan PAD sebagai salah satu komponen fiskal yang relevan dalam menjelaskan belanja kabupaten/kota. Bukti yang lebih baru mengenai perilaku pembiayaan daerah menunjukkan bahwa kekuatan PAD perlu dibaca bersamaan dengan kondisi ekonomi dan transfer yang diterima daerah, sebab respons belanja dapat berbeda antara pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dan rendah (Septianingrum et al., 2025). Secara konseptual, hasil Pasaman mendukung argumen desentralisasi penerimaan bahwa ruang fiskal yang lebih besar pada tingkat lokal memberi pemerintah daerah kapasitas lebih luas untuk menentukan alokasi pengeluaran. Park (2022) menunjukkan bahwa desentralisasi sisi penerimaan dapat mengubah komposisi belanja pemerintah lokal, meskipun konteks kelembagaan Korea Selatan berbeda dari Indonesia. Perbandingan tersebut memperkuat interpretasi bahwa peningkatan PAD penting bukan hanya untuk menaikkan jumlah belanja, tetapi juga untuk memperbaiki otonomi dalam menentukan prioritas. Implikasi kebijakannya adalah strategi peningkatan PAD perlu berfokus pada perluasan basis yang berkelanjutan dan peningkatan kepatuhan, bukan sekadar menaikkan tarif yang dapat menambah beban ekonomi lokal. Analisis Pane et al. (2021) pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara juga menunjukkan bahwa hubungan antara penerimaan daerah dan belanja perlu dibaca bersama komponen dana perimbangan, sehingga penguatan PAD tidak dapat dilepaskan dari struktur transfer.

Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah

DAU memiliki koefisien 0,564592, t-statistic 3,542254, dan probabilitas 0,0027, sehingga merupakan variabel dengan koefisien positif terbesar di antara empat komponen penerimaan yang masuk dalam estimasi OLS utama. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan DAU berkaitan kuat dengan perubahan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman setelah PAD, DAK, dan DBH dikendalikan dalam model. Secara kelembagaan, temuan ini dapat dijelaskan oleh fungsi DAU sebagai transfer umum yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah dan menopang kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Fleksibilitas relatif DAU memberi pemerintah daerah ruang lebih besar untuk membiayai kebutuhan belanja dibandingkan transfer yang diarahkan pada kegiatan tertentu. Karena total belanja mencakup berbagai fungsi dan jenis pengeluaran, tambahan DAU dapat masuk ke lebih banyak pos anggaran dan menghasilkan respons agregat yang lebih besar. Koefisien DAU yang lebih tinggi daripada PAD juga mengisyaratkan bahwa kapasitas belanja Pasaman masih sensitif terhadap transfer pusat. Namun, perbandingan koefisien ini harus dipahami dalam spesifikasi logaritmik yang sama dan tidak secara otomatis menjadi uji formal flypaper effect. Uji flypaper membutuhkan kerangka yang secara eksplisit membandingkan respons belanja terhadap transfer dan sumber daya lokal serta mempertimbangkan karakteristik model dan data. Dengan kata lain, besarnya hubungan DAU dengan belanja lebih tepat dibaca sebagai sensitivitas fiskal daripada sebagai ukuran efektivitas. Efektivitas baru dapat dinilai apabila informasi mengenai keluaran pelayanan, kualitas belanja, dan pencapaian program dianalisis bersama nilai transfer.

Bukti empiris sebelumnya mendukung pentingnya DAU dalam pembentukan belanja daerah. Purba et al. (2023) menunjukkan hubungan DAU dengan Belanja Daerah di Kota Pematang Siantar, sedangkan Apriliani dan Sudjana (2023) serta

Ependi et al. (2023) menemukan bahwa DAU merupakan salah satu sumber yang menjelaskan variasi belanja pada konteks kabupaten/kota yang mereka teliti. Penelitian Ginting et al. (2025) juga menempatkan DAU bersama PAD dan DAK sebagai determinan belanja daerah di Sumatera Utara. Pada tingkat yang lebih luas, Nurosidah et al. (2023) menunjukkan bahwa perubahan transfer antarpemerintah pada masa pandemi diikuti perubahan perilaku belanja pemerintah daerah Indonesia. Septianingrum et al. (2025) bahkan memperlihatkan bahwa respons terhadap transfer berbeda menurut kondisi ekonomi pemerintah daerah. Bukti tersebut sejalan dengan pola Pasaman bahwa transfer umum tetap penting dalam menopang kemampuan belanja. Dalam perspektif kebijakan, hasil ini tidak berarti DAU perlu dikurangi, karena tujuan utama transfer adalah mengatasi ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal. Tantangannya adalah memastikan tambahan kapasitas yang berasal dari DAU diterjemahkan menjadi kualitas layanan dan belanja produktif. Lewis (2023) menekankan bahwa kerangka fiskal baru Indonesia semakin memberi perhatian pada kualitas dan komposisi belanja daerah, sehingga evaluasi ke depan sebaiknya tidak berhenti pada besarnya respons belanja terhadap DAU tetapi juga menilai hasil pelayanan yang dihasilkan. Hasil Gamela et al. (2024) turut menunjukkan bahwa DAU tetap relevan ketika kondisi pertumbuhan ekonomi diperhitungkan dalam analisis belanja pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah

DAK menunjukkan koefisien 0,164907 dengan t-statistic 3,968758 dan probabilitas 0,0011. Koefisien positif tersebut berarti peningkatan DAK berkaitan dengan peningkatan total Belanja Daerah Kabupaten Pasaman dalam model yang diestimasi. Secara institusional, hubungan ini dapat dipahami dari karakter DAK sebagai transfer yang diarahkan untuk mendukung kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional sekaligus merupakan urusan daerah. Ketika alokasi DAK meningkat, pemerintah daerah memiliki tambahan sumber pembiayaan untuk program atau proyek yang memenuhi kriteria transfer, sehingga belanja yang terkait dengan kegiatan tersebut ikut meningkat. Nilai probabilitas DAK merupakan yang paling kecil di antara koefisien individual pada tabel regresi, tetapi besarnya koefisien lebih rendah daripada DAU dan DBH. Perbedaan tersebut logis karena DAK memiliki ruang penggunaan yang lebih spesifik dibandingkan transfer umum. Respons belanja yang tercatat pada total Belanja Daerah juga dapat mencerminkan kebutuhan pendampingan, penjadwalan kegiatan, serta kapasitas pelaksanaan program. Karena data yang digunakan bersifat agregat tahunan, penelitian ini tidak dapat mengidentifikasi sektor mana – misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau pelayanan dasar lain – yang paling besar menyerap DAK. Dengan demikian, koefisien hanya menggambarkan hubungan pada tingkat total belanja. Hubungan positif juga menunjukkan bahwa kapasitas absorpsi program penting: alokasi DAK hanya akan menghasilkan belanja apabila pemerintah daerah mampu memenuhi persyaratan, menyiapkan kegiatan, dan mengeksekusi anggaran sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Hasil mengenai DAK sejalan dengan penelitian Faisal et al. (2024), yang menunjukkan relevansi DAK dalam pembiayaan belanja pemerintah daerah, serta Ferawaty et al. (2022) yang menemukan DAK bersama PAD, DAU, dan DBH berkaitan dengan belanja kabupaten/kota. Fatimah et al. (2024) juga menempatkan komponen transfer sebagai faktor penting dalam menjelaskan belanja daerah di Jawa

Timur. Septriani et al. (2023) menemukan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja kabupaten/kota di Bengkulu, memberikan dukungan tambahan bahwa transfer khusus dapat menghasilkan respons pengeluaran yang nyata. Secara teoretis, pola tersebut berbeda dari DAU karena DAK membawa keterikatan program yang lebih kuat; oleh sebab itu, pengaruhnya terhadap total belanja tidak hanya ditentukan oleh jumlah transfer tetapi juga kesiapan daerah mengeksekusi kegiatan yang telah ditetapkan. Temuan Pasaman memperlihatkan bahwa kapasitas memanfaatkan DAK tetap menjadi bagian penting dari struktur pembiayaan daerah. Implikasi praktisnya adalah perencanaan DAK seharusnya terintegrasi dengan prioritas daerah, kesiapan teknis, jadwal pengadaan, dan pemeliharaan aset setelah proyek selesai. Efektivitas DAK tidak cukup diukur dari penyerapan anggaran, tetapi perlu dinilai dari kesinambungan manfaat pelayanan publik yang dihasilkan sehingga tambahan belanja benar-benar memperkuat kualitas pembangunan daerah. Dalam konteks desentralisasi, pengelolaan transfer khusus yang baik juga dapat mengurangi kesenjangan layanan antarwilayah apabila alokasi diarahkan pada kebutuhan dasar yang benar-benar belum dapat dipenuhi dari kapasitas fiskal lokal. Temuan Putri dan Nursiam (2025) mengenai PAD, DAU, dan DAK pada belanja modal juga menguatkan bahwa transfer khusus tetap memiliki peran pada keputusan pengeluaran, walaupun jenis belanja yang dianalisis berbeda.

Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah

DBH memiliki koefisien 0,235184, t-statistic 2,803358, dan probabilitas 0,0128. Dengan demikian, DBH berhubungan positif dan signifikan dengan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman pada taraf 5%. Secara fiskal, DBH memperluas sumber daya yang tersedia bagi daerah melalui pembagian penerimaan tertentu antara pemerintah pusat dan daerah. Tambahan DBH dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan pelayanan dan pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada PAD. Bagi daerah yang struktur ekonominya masih terkait dengan sektor primer dan basis penerimaan yang dibagihasilkan, perubahan DBH dapat menjadi sumber variasi anggaran yang penting. Koefisien DBH pada model lebih besar daripada PAD dan DAK, tetapi lebih kecil daripada DAU. Pola tersebut menunjukkan bahwa beberapa jenis transfer dapat memiliki sensitivitas belanja yang berbeda, sesuai desain dan basis alokasinya. Namun, karena penelitian tidak memisahkan jenis DBH pajak dan sumber daya alam, hasil tidak dapat digunakan untuk menentukan komponen DBH mana yang paling menentukan respons belanja. Selain itu, nilai DBH dapat dipengaruhi oleh kebijakan nasional dan kinerja basis penerimaan yang berada di luar kendali langsung pemerintah kabupaten. Oleh sebab itu, temuan perlu dibaca sebagai hubungan fiskal antartingkat pemerintahan, bukan sebagai hasil upaya penerimaan daerah semata. Ketidakpastian tersebut membuat perencanaan DBH membutuhkan asumsi yang konservatif, terutama ketika pendapatan bagi hasil membiayai program berulang yang menimbulkan kewajiban anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Temuan DBH mendapatkan dukungan dari Purba et al. (2023), yang menunjukkan bahwa DBH dan DAU berhubungan dengan belanja daerah, serta Putra et al. (2025), yang menempatkan DBH bersama PAD dan DAU sebagai sumber penting pembiayaan daerah. Liyana et al. (2022) juga menegaskan kaitan antara mekanisme bagi hasil pajak dan pembangunan daerah, sedangkan Pramesti dan Mildawati (2025) menunjukkan bahwa DBH berperan dalam struktur kemandirian

keuangan pemerintah daerah. Hasil Pasaman memperluas bukti tersebut dengan menunjukkan bahwa DBH tetap signifikan ketika PAD, DAU, dan DAK dipertimbangkan bersamaan dalam seri tahunan yang panjang. Dari perspektif kebijakan, penerimaan DBH sebaiknya diperlakukan sebagai bagian dari strategi fiskal menengah, terutama apabila nilainya rentan terhadap perubahan basis penerimaan atau formula transfer. Ketergantungan berlebihan pada sumber yang volatil dapat menimbulkan risiko terhadap kesinambungan program ketika transfer menurun. Karena itu, pemerintah daerah perlu menghubungkan proyeksi DBH dengan pengendalian komitmen belanja dan penguatan PAD. Temuan internasional mengenai efek hibah antarpemerintah juga menunjukkan bahwa transfer dapat memperbesar belanja lokal dan menghasilkan pengaruh lintas wilayah (Vincent & Osei Kwadwo, 2022), sehingga kualitas penggunaan transfer menjadi sama pentingnya dengan besarnya transfer yang diterima. Pendekatan tersebut membantu mencegah ekspansi belanja permanen yang hanya ditopang kenaikan transfer sementara dan sekaligus menjaga ruang fiskal ketika penerimaan bagi hasil berfluktuasi. Dewi dan Oktafia (2026) juga melaporkan relevansi PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Daerah dalam konteks kabupaten lain, sehingga hasil Pasaman memiliki pembandingan empiris yang relatif mutakhir.

Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Daerah

PDRB tidak muncul sebagai koefisien pada output OLS utama yang tersedia, sehingga arah dan besarnya koefisien PDRB tidak dapat diinterpretasikan secara sah dari tabel regresi tersebut. Namun, pengujian Likelihood Ratio tambahan yang tersedia memberikan nilai statistik 3,603381 dengan probabilitas 0,0577. Karena probabilitas sedikit lebih besar daripada 0,05, bukti yang tersedia belum cukup untuk menyatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada taraf 5%. Posisi nilai p yang dekat dengan batas signifikansi menunjukkan bahwa kesimpulan tidak seharusnya disederhanakan menjadi “tidak ada hubungan sama sekali”; hasil yang lebih tepat adalah bahwa bukti statistik belum memenuhi ambang 5% dalam pengujian yang tersedia. Secara ekonomi, PDRB mencerminkan skala aktivitas produksi, bukan sumber penerimaan anggaran yang otomatis masuk ke kas daerah. Pertumbuhan aktivitas ekonomi baru dapat memperluas ruang fiskal apabila diterjemahkan menjadi basis pajak, retribusi, atau sumber penerimaan lain yang efektif. Sebaliknya, bila belanja daerah lebih banyak ditopang transfer, perubahan PDRB dapat memiliki hubungan langsung yang lebih lemah dengan total belanja. Interpretasi ini konsisten dengan struktur model Pasaman yang menunjukkan koefisien transfer cukup dominan. Selain itu, PDRB dapat meningkat tanpa kenaikan PAD yang sebanding apabila sektor yang tumbuh tidak berada pada basis pajak daerah atau apabila efektivitas pemungutan belum meningkat.

Literatur memperlihatkan bahwa hubungan antara kondisi ekonomi daerah dan belanja pemerintah memang tidak seragam. Septriani et al. (2023) menemukan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja kabupaten/kota di Bengkulu, sementara penelitian Lubis dan Nasution (2024) menempatkan pertumbuhan ekonomi bersama PAD, DAU, dan DAK sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menjelaskan belanja daerah. Perbedaan hasil antardaerah dapat berasal dari struktur ekonomi, tingkat kemandirian fiskal, formula transfer, kebutuhan pelayanan, dan periode penelitian. Sofilda et al. (2023) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, pembangunan manusia, dan pertumbuhan

ekonomi saling berkaitan dalam konteks regional Indonesia, yang mengingatkan bahwa PDRB tidak bekerja sebagai variabel fiskal yang berdiri sendiri. Untuk Pasaman, hasil LR yang belum signifikan dapat berarti bahwa perubahan skala ekonomi belum diterjemahkan secara langsung ke total belanja, atau pengaruhnya bekerja melalui PAD dan mekanisme transfer. Akan tetapi, karena koefisien PDRB dan hasil ADF PDRB belum terdapat pada output utama, penjelasan tersebut tetap bersifat interpretatif. Sebelum submit final, estimasi model yang memasukkan PDRB bersama empat variabel fiskal perlu dijalankan kembali agar arah, magnitudo, dan signifikansinya dapat dinilai dalam spesifikasi yang sama. Pengujian ulang menjadi penting karena nilai p 0,0577 berada sangat dekat dengan ambang 5%; perubahan spesifikasi, transformasi, atau tambahan observasi dapat memengaruhi ketepatan estimasi tanpa harus mengubah makna ekonomi dasarnya.

Pengaruh Simultan dan Implikasi Fiskal

Secara simultan, PAD, DAU, DAK, dan DBH pada output OLS utama memiliki probabilitas F di bawah 0,001, sehingga kombinasi empat sumber penerimaan tersebut berkaitan signifikan dengan Belanja Daerah. R-squared 0,992634 menunjukkan bahwa model menjelaskan hampir seluruh variasi sampel, tetapi nilai yang sangat tinggi pada data runtut waktu dengan 21 observasi juga dapat mencerminkan tren bersama antarseri. Oleh karena itu, hasil tidak boleh dipakai untuk menyimpulkan bahwa faktor lain tidak penting. Kebutuhan pelayanan, kebijakan nasional, komposisi penduduk, inflasi, perubahan klasifikasi anggaran, kejadian luar biasa, dan kualitas institusi dapat memengaruhi belanja tetapi tidak tercakup dalam model. Pola koefisien memperlihatkan DAU sebagai respons terbesar, diikuti DBH, PAD, dan DAK. Susunan ini konsisten dengan argumen bahwa transfer antarpemerintah masih menjadi komponen penting kapasitas fiskal Pasaman. Namun, penelitian tidak melakukan uji formal flypaper effect, sehingga istilah tersebut digunakan hanya sebagai konteks literatur, bukan sebagai kesimpulan empiris utama. Pendekatan ini menghindari klaim yang melampaui spesifikasi model dan menjaga fokus pada determinan fiskal yang benar-benar diuji. Evaluasi model juga sebaiknya membedakan kemampuan menjelaskan variasi historis dari kemampuan memprediksi dan menjelaskan mekanisme kebijakan, sebab keduanya membutuhkan bukti dan pengujian yang berbeda.

Secara lebih luas, hasil Pasaman sejalan dengan literatur Indonesia yang menunjukkan bahwa transfer dapat memicu respons belanja yang kuat. Afrizal dan Khoirunurrofik (2022) menemukan bahwa perubahan kewenangan pajak lokal tidak serta-merta menghilangkan pola respons belanja terhadap transfer, sedangkan Nurosidah et al. (2023) menunjukkan keberadaan respons transfer selama guncangan pandemi. Septianingrum et al. (2025) memperlihatkan bahwa kekuatan flypaper effect berbeda menurut kondisi ekonomi daerah. Bukti tersebut memberi konteks bagi koefisien DAU yang relatif besar di Pasaman, tetapi tidak menggantikan kebutuhan pengujian formal. Implikasi utama penelitian adalah bahwa strategi fiskal daerah perlu bergerak pada dua jalur sekaligus: memperluas PAD secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas penggunaan transfer. Penguatan PAD dapat memperbesar otonomi pengambilan keputusan, sedangkan pengelolaan DAU, DAK, dan DBH yang berorientasi hasil dapat memastikan transfer benar-benar meningkatkan layanan. Kerangka kebijakan terbaru juga semakin menempatkan kualitas belanja sebagai isu sentral dalam hubungan fiskal pusat-daerah (Lewis, 2023). Dengan demikian,

keberhasilan desentralisasi tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari kemampuan daerah mengubah sumber daya fiskal menjadi keluaran dan manfaat publik yang terukur. Orientasi pada hasil tersebut juga membantu menghindari insentif untuk sekadar memperbesar serapan anggaran tanpa memperhatikan nilai manfaat, keberlanjutan fiskal, dan pemerataan pelayanan antarkelompok masyarakat. Pola ketergantungan transfer juga dibahas oleh Malik dan Inuzula (2021) serta Farica dan Wijaya (2023), yang menegaskan pentingnya membedakan sumber penerimaan ketika menilai respons pengeluaran daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur penerimaan fiskal berhubungan erat dengan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman selama 2004–2024. PAD, DAU, DAK, dan DBH pada estimasi OLS utama memiliki koefisien positif dan signifikan, dengan DAU menunjukkan respons terbesar di antara variabel yang masuk dalam model. Hasil tersebut menegaskan bahwa kemampuan belanja tidak hanya ditopang oleh kapasitas penerimaan sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi mekanisme transfer antarpemerintah. PDRB belum menunjukkan signifikansi pada taraf 5% berdasarkan pengujian Likelihood Ratio tambahan, sehingga perubahan skala aktivitas ekonomi tidak dapat dinyatakan memiliki hubungan langsung yang kuat dengan belanja dari bukti yang tersedia. Secara ilmiah, penelitian memberikan bukti spesifik Kabupaten Pasaman dalam rentang waktu panjang dan menunjukkan pentingnya memisahkan jenis transfer ketika menjelaskan respons belanja daerah. Secara kebijakan, peningkatan kemandirian fiskal melalui PAD perlu berjalan bersamaan dengan pengelolaan DAU, DAK, dan DBH yang berorientasi pada hasil pelayanan dan keberlanjutan fiskal. Kesimpulan tetap perlu dibaca secara hati-hati karena jumlah observasi terbatas, orde integrasi seri tidak seragam, dan koefisien PDRB belum tersedia pada output regresi utama.

REKOMENDASI

Penelitian lanjutan disarankan memperkuat spesifikasi runtut waktu dengan menambahkan hasil ADF untuk PDRB, menjalankan estimasi yang memasukkan kelima variabel dalam satu model, serta memilih pendekatan yang konsisten dengan orde integrasi data dan kemungkinan hubungan jangka panjang. Variance Inflation Factor atau matriks korelasi perlu dilaporkan agar diagnosis multikolinearitas dapat dinilai secara langsung. Pengujian robustness juga dapat memasukkan perubahan struktural, terutama pada periode pandemi dan perubahan rezim kebijakan fiskal setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk memperluas validitas eksternal, penelitian berikutnya dapat menggunakan panel kabupaten/kota di Sumatera Barat dan membedakan Belanja Daerah menurut fungsi atau jenis belanja. Bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman, prioritas praktis adalah memperkuat basis PAD tanpa menambah distorsi ekonomi, meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi DAK, mengelola risiko volatilitas DBH, serta memastikan DAU diarahkan pada kebutuhan pelayanan yang memiliki indikator keluaran dan hasil yang jelas. Pendekatan tersebut memungkinkan evaluasi fiskal bergeser dari sekadar besarnya belanja menuju kualitas manfaat publik yang dihasilkan.

REFERENSI

- Akbar, A. F., & Huda, N. (2024). Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. *Jurnal Economic Development*, 2(1), 31–42.
- Apriliani, D., & Sudjana. (2023). Analisis flypaper effect, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2017–2021. *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1), 39–50.
- Afrizal, R. M., & Khoirunurrofik. (2022). Examining flypaper effect in Indonesia: Evidence after transferring urban-rural land and building tax to locals government. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 465–478. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.465-478>
- Dahliah. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, jumlah penduduk dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(2), 2750–2761.
- Dewi, K. T. B., & Oktafia, R. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Jombang periode 2005–2024. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 1–15.
- Ependi, Ningsih, P. T. S., Gusvarizon, M., & Mahendrawati, C. A. M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin*, 4(2), 29–43.
- Faisal, Y., Yanti, L. P., & Novelita. (2024). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 8(1), 402–412.
- Farica, W., & Wijaya, R. S. (2023). The flypaper effect phenomena in regional expenditure in districts/cities of the Special Province of Yogyakarta. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 3(4), 1347–1362. <https://doi.org/10.55927/ijba.v3i4.5154>
- Fatimah, Y., Utami, W. B., & Ma'ruf, M. H. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(2), 531–539.
- Ferawaty, M., Karundeng, D. R., & Suyanto, M. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3203–3213.
- Gamela, M. I., Hartono, A., & Ulfah, I. F. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 3(2), 154–179.
- Ginting, E. M., Hasanah, I., Nababan, V. R., Tobing, P. Y. L., & Lubis, P. K. D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019–2023. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 4869–4881.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>

- Liyana, N. F., Ratnasari, G. A. I., & Susanto, E. (2022). Pajak, Dana Bagi Hasil pajak dan pembangunan daerah di Indonesia. *Balance Vocation Accounting Journal*, 6(2), 112-121.
- Lubis, S. O., & Nasution, D. A. D. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. *Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan*, 1(3), 220-239.
- Malik, I., & Inuzula, L. (2021). Flypaper effect terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4(2), 202-216.
- Nurosidah, S., Khusaini, M., & Prasetyia, F. (2023). Intergovernmental transfers reduction policy and flypaper effect: Case of Covid-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15(1), 1-18. <https://doi.org/10.17977/um002v15i12023p001>
- Pane, Y., Simarmata, A. M., Rezeki, S., Rinaldi, M., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 212-225. <https://doi.org/10.38043/jids.v5i2.3182>
- Park, J. (2022). Fiscal decentralization and the composition of local government expenditure: Evidence from South Korea. *Public Finance Review*, 50(1), 62-90. <https://doi.org/10.1177/10911421221093142>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Pramesti, I. O., & Mildawati, T. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap kemandirian keuangan daerah (studi kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 14(3).
- Purba, E., Damanik, D., & Damanik, P. (2023). Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Pematang Siantar. *Jurnal Kafebis - Jurnal Kajian Fenomena Ekonomi & Bisnis*, 1(1), 49-58.
- Putra, A. A. P., Hafizi, M. R., & Zahra, K. A. Z. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018-2022. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(5), 3767-3780.
- Putri, N. S., & Nursiam. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal di Jawa Tengah (2020-2023). *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(4), 1356-1370.
- Septianingrum, N. A., Halim, A., & Utami, T. P. (2025). Local expenditure financing response in regencies and municipalities in Indonesia: Analysis of the flypaper effect phenomenon. *Journal of Accounting and Investment*, 26(1), 1-17. <https://doi.org/10.18196/jai.v26i1.23983>
- Septriani, S., Hadiyanto, H., & Ekaputri, R. A. (2023). The determinant factors of regional expenditure. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 8(1), 63-83. <https://doi.org/10.31002/rep.v8i1.626>
- Sofilda, E., Hamzah, M. Z., & Kusairi, S. (2023). Analysis of fiscal decentralisation, human development, and regional economic growth in Indonesia. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 2220520. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2220520>
- Tanjung, A. H., Salam, S., Rusdi, J. F., Ermawati, Y., Novianty, I., Hendaris, R. B., & Apriliawati, Y. (2021). Flypaper effect assessment methods in the expansion of

- regional autonomy. *MethodsX*, 8, 101387.
<https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101387>
- Vincent, R. C., & Osei Kwadwo, V. (2022). Spatial interdependence and spillovers of fiscal grants in Benin: Static and dynamic diffusions. *World Development*, 158, 106006. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106006>